

PERAN *TRANSNATIONAL SOCIAL MOVEMENT BLACK LIVES MATTER* DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN RASIAL TERHADAP KELOMPOK MINORITAS KULIT HITAM DI INGGRIS RAYA TAHUN 2020-2021

Sultan Muhammad Fadhil¹, Nurmasari Situmeang², Dairatul Ma'arif³

UPN "Veteran" Jakarta

sultanmuhammad@upnvj.ac.id

ABSTRACT

This research paper will talk about the role of the Black Lives Matter transnational movement in establishing racial equality toward Black minority groups in the United Kingdom in 2020-2021. This study will use the concept of transnational social movements as an analytical knife in dissecting the issue. The methodological approach that will be used is a qualitative - descriptive type of case study because it is considered capable of describing in detail as well as being structured. From this study, it was found that although United Kingdom has suppressed acts of racism with the Equality Act, racism still occurs in the lives of minority communities, especially black people. The pandemic condition is able to strengthen the phenomenon of racism in the United Kingdom. In addition, this study also finds the role and contribution of the transnational Black Lives Matter movement as a promoter of racial equality in the United Kingdom. Contribution through helping narratives of racism at the local level to be able to rise to the international level, as well as putting pressure on policy makers through campaigns on social media and demonstrations to achieve the goal of eliminating racism for racial equality.

Keywords: *Transnational Social Movement, Black Lives Matter, United Kingdom*

ABSTRAK

Penelitian tulisan ini akan berbicara tentang peran gerakan transnasional Black Lives Matter dalam mewujudkan kesetaraan rasial terhadap kelompok minoritas di Inggris Raya tahun 2020-2021. Penelitian ini akan menggunakan konsep gerakan sosial transnasional sebagai pisau analisis dalam membedakan isu permasalahan. Pendekatan metodologis yang akan digunakan adalah metode kualitatif – deskriptif jenis studi kasus karena dianggap mampu mendeskripsikan secara terperinci sekaligus terstruktur. Dari penelitian ini menemukan bahwa walaupun Inggris Raya telah menegakkan tindakan rasisme dengan Equality Act tetapi rasisme tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat minoritas khususnya kulit hitam. Kondisi pandemi mampu menguatkan fenomena rasisme di Inggris Raya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan peranan serta kontribusi dari gerakan transnasional Black Lives Matter sebagai promotor kesetaraan rasial di Inggris Raya. Kontribusi melalui membantu narasi-narasi rasisme di level lokal agar mampu naik ke level internasional, sekaligus memberi tekanan pada para pembuat kebijakan melalui kampanye di media sosial serta demonstrasi guna meraih tujuan yaitu penghapusan rasisme demi kesetaraan rasial

Kata kunci: Gerakan Sosial Transnasional, Black Lives Matter, Inggris Raya

PENDAHULUAN

Rasisme merupakan salah satu permasalahan utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Khususnya masyarakat heterogen dimana

banyaknya perbedaan baik suku, ras, agama dan lain-lainnya. Rasisme sendiri merupakan bentuk diskriminasi terhadap perbedaan ras dalam kata lain perbedaan dalam bentuk, warna dan ciri

khlas lainnya yang dimiliki sekelompok masyarakat seperti orang Afrika dan keturunannya memiliki perbedaan penampilan dengan orang Asia dan keturunannya. Kata rasisme itu sendiri dapat membangkitkan reaksi emosional yang sangat kuat, terutama bagi mereka yang telah merasakan penindasan dan eksploitasi yang berasal dari sikap dan perilaku rasis. Untuk individu anggota kelompok ini, rasisme telah mengakibatkan rasa sakit akan penindasan. Bagi mereka yang tergabung dalam kelompok budaya yang telah memiliki kekuatan untuk menindas dan mengeksploitasi orang lain, rasisme istilah yang sering membangkitkan pikiran sama kuat dan reaksi emosional yang mengingkari tanggung jawab dan partisipasi dalam tindakan rasis dan berpikir (Lustig & Koester, 2003). Di abad 21, masyarakat sudah memahami pentingnya meminimalisir segala bentuk hal ofensif yang dapat menyebabkan satu kelompok merasa terdiskriminasi. Walaupun bukan berarti rasisme sudah tidak ada.

Suatu pemahaman yang tidak terucap, tetapi secara empatik dipahami oleh seseorang bahwa sesuatu yang putih itu normal. Sedangkan segala bentuk persepsi yang berhubungan dengan hitam adalah negatif atau rendah adalah bentuk rasisme inheren dalam masyarakat. Rasisme dipahami sebagai bentuk diskriminasi atau prasangka terhadap ras. Salah satu pandangan rasis yang diungkapkan oleh Stuart Hall, yaitu bagaimana masyarakat Amerika berkulit putih di abad ke-19 membenarkan perbudakan. Mereka beranggapan bahwasannya orang kulit hitam mendukung perbudakan atas diri mereka karena itu suatu kewajiban dan menempatkan mereka sebagai “anak alam” yang dilahirkan sebagai pelayan bukan manusia beradab. Padahal semua

manusia merupakan spesies sama dan bagian biologis yang penting bagi manusia adalah sama bagi kita semua. Rasisme menjadi penghalang utama atas keberhasilan komunikasi antar budaya (Samovar et al., 2010). Padahal komunikasi antar budaya adalah aspek penting dalam mencegah perpecahan dan konflik.

Implementasi pemikiran rasis dalam kehidupan sehari-hari dapat di bagi menjadi 3 hal yang saling berhubungan satu sama lain menurut John Downing dan Charles Husband. 3 hal tersebut sebagai berikut: (1) meyakini bahwa manusia terbagi secara natural, terlihat dari ciri fisik, perbedaan darah dan mensetujui adanya perbedaan antara “darah murni” dengan darah campuran”; (2) beranggapan bahwa kondisi mental seseorang terikat erat dengan kondisi struktur fisik dan kepuasan perilaku akan pengetahuan label struktur rasial; (3) kepribadian seseorang dan kapasitas ide dalam hal budaya, politik dan moral nasional, adalah hasil dari berbagai macam entitas sosial: ras, kebangsaan, kelas, keluarga, yang kuasa dan pengaruhnya jelas tanpa memikirkan definisi lebih jauh mengenai hubungan diantara kelompok dan ‘produk’ spiritual sebagai variable pembentuk seorang individu (Downing & Husband, 2005). Dasar pemikiran rasis ini terlihat sangat dangkal karena melihat umat manusia sebagai spesies berkelas (superior dan inferior) ketimbang sebagai spesies yang memiliki keragaman, kompleksitas dan keunikan dalam kehidupan sosial.

Penulis menyetujui bahwa ini adalah proses ideologi, dimana merupakan konstruksi dari *struggle of power* (pergolakan kekuatan) di dalam kehidupan sosial yang tidak setara dan stabilnya diferensiasi sosial. Konsep ras dijadikan sebuah metafora bagi relasi

hubungan dominasi dan proses eksploitasi dalam institusional sosial. Dan juga, dengan proses subjektifitas dan representasi dalam perjuangan makna dan identitas satu sama lain (Omi & Winant, 2014). Dalam kata lain rasisme terjadi karena adanya persaingan antar kelompok di dalam masyarakat, bukan berarti persaingan itu negatif. Persaingan dimaksud di atas adalah persaingan yang berlandaskan pandangan buruk dan di implementasikan dalam bentuk negatif. Contoh adanya seseorang berasal dari kelompok A yang beranggapan bahwa orang dari kelompok B merupakan orang pemalas. Akhirnya si A (dari kelompok A) menolak mempekerjakan si B (dari kelompok B) walaupun secara kapasitas dia memenuhi kualifikasi pekerjaan tersebut. Sedangkan contoh persaingan yang baik adalah seperti, kelompok C ingin meningkatkan kualifikasi kelompoknya dengan membuat pelatihan khusus guna meningkatkan kemampuan dasar anggota kelompok C. Dari contoh di atas kita dapat memahami bahwa tindakan rasis itu berwujud sebagai tindakan yang merugikan kelompok tertentu dalam hal ini kelompok dari ras lain.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang "The Making of Citizens: A Comparative Study of Methods of Civic training" Charles E. Merriem, Charles menjelaskan 5 pokok tugas Negara yaitu: 1) Menegakkan keadilan; 2) Perlindungan; 3) Pertahanan; 4) Melaksanakan Penertiban; dan 5) Mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pemikiran tokoh ahli dalam ilmu politik Indonesia yaitu Meriam Budiardjo, Meriam merangkum hal tersebut menjadi 2 fungsi pokok. Pertama Negara harus Melaksanakan penertiban agar tercapainya tujuan bersama serta

mencegah terjadinya perselisihan-perselisihan yang ada di masyarakat. Kedua, Mengusahakan akan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat (Miriam Budiardjo, 1991). Dari pendapat ahli di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Negara adalah aktor utama dalam perlindungan dan fasilitator kemakmuran dalam hidup bagi masyarakatnya. Termasuk perlindungan dari segala tindakan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat dan memberi fasilitas demi kehidupan yang layak. Selain itu Negara juga harus memikirkan tindakan yang diambil bahkan perlu mengubah tindakan sebelumnya, guna mencegah terjadinya perselisihan dalam masyarakat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertekad untuk menggunakan seluruh kemampuannya guna melawan rasisme yang terjadi. PBB melihat bahwa kehadiran rasisme sebagai sesuatu yang menjatuhkan nilai-nilai utama dari organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan rasisme bertentangan dengan Piagam PBB (Nations, 2020). PBB telah menetapkan segala larangan akan rasisme dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional guna memberi obligasi pada Negara agar menghapus diskriminasi baik dalam ruang publik serta privat. Prinsip kesetaraan juga membuat Negara untuk mengadopsi langkah-langkah khusus untuk menghilangkan kondisi yang menyebabkan atau membantu menjaga rasisme untuk terjadi (OHCHR, 2019).

Inggris Raya sebagai salah satu anggota PBB serta Dewan Keamanan tetap sudah seharusnya menentang rasisme. Inggris Raya mewujudkan hal tersebut dengan membuat undang-undang kesetaraan 2010 guna menjadi patokan hukum untuk mengurangi bahkan menghentikan diskriminasi. Basis hukum anti-diskriminasi ini lahir

di era Kementrian Brown. Undan g-undan g ini adalah turunan dari undan g-undan g kesetaraan di 2006. Berfokus pada undan g-undan g kesetaraan gaji, diskriminasi sex, hubungan ras dan diskriminasi disabilitas. Guna melindungi keternagakerjaan dari diskriminasi agama, ras, umur dan orientasi seksual. Dengan adan ya undan g-undan g diharapkan dapat membuat Inggris Raya menjadi negara adil, makmur dan toleran dalam kehidupan kenegaraannya sehari-hari. (Elena Fella; Maria Dayband, 2017). Undan g-undan g ini melindungi masyarakat dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam situasi, contoh: keternagakerjaan; bank; tokoh; rumah sakit; asosiasi perumahan; sekolah; universitas; transportasi umum; departemen pemerintahan; dan lembaga lainnya. Dapat dipahami bahwa undan g-undan g ini lahir dikarenakan adan ya urgensi dari situasi dan kondisi sosial-ekonomi yang terjadi di Inggris Raya.

Walaupun banyak masyarakat Inggris Raya merasa puas dengan keadaan sekarang bukan berarti isu rasisme tidak ada atau terselesaikan. Rasisme bagaikan bayangan yang selalu mengikuti langkah kehidupan sehari-hari masyarakat Inggris. menurut data sensus di tahun 2011, 87% masyarakat Inggris Raya adalah dari masyarakat kulit putih sementara 13% terdiri atas masyarakat BAME (Black, Asian, Minority Ethnicity) yaitu gabungan masyarakat kulit hitam, keturunan Asia dan masyarakat etnis lainnya (Gov.Uk, 2021). Sebelumnya disini penulis ingin menegaskan bahwa data sensus diatas adalah data terbaru dan komprehensif untuk saat ini berdasarkan Office of National Statistics (ONS) from UK. Perbandingan massif ini dapat dipahami bahwa masyarakat kulit hitam adalah golongan minoritas di Inggris Raya.

Dikarenakan jumlah antara orang kulit berwarna dan orang kulit putih hampir 1 berbanding 9 sesuai data tersebut, menyebabkan sulitnya isu rasisme terekspos secara menyeluruh tanpa adan ya momentum pendukung. Perlu adan ya tekanan dari masyarakat dalam skala massif yang dapat menjadi momentum guna mengekspos isu rasisme yang terjadi di Inggris Raya.

Berdasarkan data UK Confidential Enquiry into Maternal Deaths, dapat diketahui bahwa ditahun 2014 sampai 2016 ibu hamil dari keluarga kulit hitam 5 kali lebih beresiko mengalami kematian disaat hamil dibandingkan dari keluarga kulit putih. Perlu diketahui bahwa 4 dari 10 rumah sakit terbaik di dunia berada di Inggris Raya. Dan juga populasi masyarakat minoritas khususnya kulit hitam hanya 13% di Inggris Raya sedan gkan dari data diatas menjelaskan adan ya realita dilapangan yang tidak dapat diacuhkan. Realita ini menunjukan komunitas masyarakat minoritas sulit mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat kulit putih. Seharusnya menurunkan angka kematian ibu hamil adalah tujuan penting setiap Negara tanpa melihat latar belakang masyarakat negara tersebut. Adan ya lingkaran setan dalam Masyarakat Inggris Raya inilah permasalahan utama kenapa rasisme atau diskriminasi terjadi dalam masyarakat negara tersebut. Dimulai dari realita ibu hamil sebelumnya, ternyata alasan kenapa resiko lebih tinggi adalah karna faktor ekonomi.

Dikarenakan ketidakmampuan dalam mendapatkan perawatan terbaik selama hamil yang menyebabkan angka ini. Alasan ekonomi menjadi faktor peting dibalik fakta ini, padahal alasan kenapa sulit mendapatkan biaya untuk penanganan adalah karna rasisme sistematis dalam ekonomi.

Di tahun 2018 berdasarkan data survey dari ONS, angka tertinggi pengangguran dipegang oleh masyarakat kulit hitam mencapai 2 kali lebih tinggi dari masyarakat kulit putih. Hanya sekitar 66.9% populasi masyarakat kulit hitam yang berkeja sedan gkan masyarakat kulit putih mencapai 76.4%. walupun dalam kasus seseorang kulit hitam mendapat pekerjaan, dia akan tetap mendapat diskriminasi dalam hal gaji atau upah yang didapatkan. Bersumber dari data yang sama pekerja kulit hitam mendapat bayaran upah 21.7% lebih sedikit dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Sekitar 1.9 juta masyarakat kulit hitam dibayar kurang dari £3.2 miliar dibandingkan rekan kulit putih mereka berdasarkan data dari tahun yang sama oleh fondasi Resolution (Colegrave, 2020). Perbandingan diatas dilakukan terhadap sample dengan latar belakang pendidikan dan jabatan yang sama antara sample satu sama lain.

Semua Negara mengalami ancaman Covid-19 berusaha menagani permasalahan ini. Semua Negara menggerakkan departemen kepolisian mereka, mengingat fungsi polisi sebagai penertib masyarakat. Dengan adan ya urgensi tersebut negara memberikan otoritas lebih kepada polisi guna meningkatkan kinerja Negara dalam menanggulangi pandemi. Inggris Raya termasuk Negara yang menggunakan kepolisiannya demi menertibkan dan melancarkan proses lockdown. Negara memberikan peran terhadap kepolisian dalam menghadapi permasalahan non-kriminalitas karena sitematis rantai komando yang dimiliki departemen tersebut. Polisi mendapat otoritas lebih guna menangani pandemi mengikuti arahan Negara. Tetapi seringkali kepolisian mengancam dibandingkan melindungi publik khususnya kelompok minoritas seperti masyarakat kulit

hitam. Otoritas tersebut harus di pertanyakan mengingat polisi sering mengubah masyarakat membutuhkan sebagai kriminal yang perlu ditangani (Harris et al., 2021). Seringkali isu rasisme yang dilakukan oleh polisi diacukan dikarnakan pandan gan secara luas tentang kepolisian sebagai sosok terpecaya, sedan gkan kelompok minoritas seperti masyarakat kulit hitam sebagai kriminal berura-pura korban.

Selama awal pandemi angka kejahatan di Inggris Raya menurun dikarenakan masyarakat lebih bayak menghabiskan waktu dirumah. Hal ini terjadi karena kejahatan cenderung terjadi di tempat umum dan rumah yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Dikarenakan selama pendemi masyarakat mengikuti prosedur lockdown dan tinggal dirumah sekaligus menghindari tempat umum. Tetapi disaat bersamaan ada peningkatan penggunaan kekerasan oleh departemen kepolisian dalam menangani kasus yang terjadi. Adan ya peningkatan penggunaan kekerasan oleh polisi sekitar 12.5% sendan gkan ada penurunan angka kejahatan mencapai 19 %, ini terjadi dalam frame waktu bersamaan (Gidda, 2020). Polisi boleh menggunakan kekerasan dalam melindungi diri atau orang lain, proses penangkapan, pencegahan kejahatan dan perlindungan properti selagi dalam kadar rasional dan proposional. Tindakan kekerasn yang legal dilakukan polisi adalah pengekangan, borgol, penggunaan tongkat, gigitan anjing, semprotan iritan dan taser. Kelompok minoritas beresiko tinggi menjadi target kekerasan polisi dikarenakan dengan penigkatan pengawasan di ruang publik oleh polisi selama pandemi. Dalam masa ini kelompok minoritas melihat polisi sebagai sosok sewenang-wenang dan berlebihan dalam bertindak. Kondisi pandemi dengan sejarah

rasisme dalam kepolisian inggris saling menguatkan satu sama lain.

Kekuatan dan kebebasan baru departemen kepolisian berasal dari keputusan hukum untuk menangani pandemi bernama The Coronavirus Act. Undang-undang tersebut pertama kali di tawarkan ke parlemen pada tanggal 17 Maret 2020 dan disahkan di bulan yang sama. Hukum baru ini memberikan Pemerintah kekuasaan darurat guna menangani pandemi. Salah satu aktor yang diberikan otoritas tersebut oleh Negara adalah kepolisian. Polisi dapat menahan seseorang jika seseorang tersebut dianggap sebagai berpotensi menular. Ini tercantum dalam bagian 51 dari peraturan tersebut. Berpotensi menular sendiri memiliki makna dan pemahaman yang luas. Hal ini menyebabkan sering terjadinya tindakan berlebihan oleh pihak kepolisian dan terkesan sewenang-wenang. Sering kali anggota kelompok minoritas ditahan dengan alasan berpotensi menular oleh polisi (Spurrier, 2020). Salah satu kasus sepele yang terjadi adalah ketika seorang orang kulit hitam mengantarkan makanan ke anggota rentan dalam keluarga mereka. Sering penggunaan borgol terlalu ketat dan semprotan iritan digunakan oleh kepolisian dalam menangani kasus sepele ketimbang menggunakan negosiasi dan rasionalitas. Diskriminasi dalam sistem hukum di Inggris Raya juga terjadi dalam pengadilan. Diskriminasi dalam pemberian hukuman penjara dialami oleh masyarakat kulit hitam. Masyarakat kulit hitam beresiko mendapat hukuman 50% lebih berat daripada masyarakat kulit putih. Pemuda-pemudi kulit hitam memiliki rata-rata hukuman penjara mencapai 28 bulan sedangkan pemuda-pemudi kulit putih hanya sekitar 19 bulan di tahun 2017 (Colegrave, 2020). Sulit bagi terdakwa pemuda-pemudi kulit hitam mengajukan permohonan

pembayaran jaminan sebagai ganti masa tahanan karena peluang diterima dalam pengadilan lebih kecil. Hal ini dimotivasi oleh stigma negatif masyarakat kulit hitam sebagai kriminal menyebabkan buruknya performa pelayanan hukum terhadap mereka.

Berdasarkan hasil analisis ONS (Office of National Statistic) menyatakan bahwa masyarakat kulit hitam khususnya laki-laki 3 kali lebih beresiko mati dikarenakan Covid-19 dibandingkan Laki-laki Kulit putih. Sedangkan wanita kulit hitam sekitar 2 kali dibandingkan wanita kulit putih di Inggris dan Wales. Atau secara lebih detail dari 100.000 populasi kemungkinan kematian terhadap laki-laki kulit hitam mencapai 277.7 sedangkan laki-laki kulit putih sekitar 87.0 saja (Nafilyan & Chris White, 2020). Hal ini sangat disayangkan mengingat Inggris Raya merupakan Negara di bagian depan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 secara global. Perlu adanya entitas non-negara yang berasal dari kolektif masyarakat guna memberi tekanan pada pemerintahan Inggris Raya untuk meningkatkan pelayanannya khususnya terhadap kelompok minoritas yaitu masyarakat kulit hitam.

Perlu adanya peningkatan kepekaan pemerintah akan isu rasisme, cara untuk menggapai hal tersebut adalah melalui peranan aktor non-negara. aktor non-negara cenderung lebih mudah dalam melakukan manuver di ranah global karena tidak terikat oleh konsep Negara dimana konsep tersebut membuat Negara tidak dapat melampaui batas kedaulatan negaranya. Salah satu aktor non-negara tersebut adalah gerakan sosial transnasional. Gerakan sosial transnasional lahir karena adanya solidaritas yang berasal dari menjadi bagian dalam kolektivitas transnasional terdiri atas beragamnya perjuangan

lokal (Smith, 2005) Gerakan ini mampu bergerak melampaui batas Negara dalam mengorganisir aktifitas aktor dari gerakan tersebut guna meraih tujuan spesifik gerakan, seperti perencanaan protes atau konferensi aktivis (Maiba, 2005).

Gerakan sosial transnasional yang bergerak untuk memberantas diskriminasi khususnya rasisme adalah gerakan Black Lives Matter. Gerakan yang berasal dari Amerika Serikat ini berhasil tumbuh besar hingga berskala transnasional. Gerakan ini terkenal berkat peran sosial media melalui #BlackLivesMatter. Gerakan ini berfokus pada Negara Amerika Serikat, Inggris Raya dan Canada walaupun secara global sudah menyebar, mengngat bahwa 3 negara tersebut punya sejarah mendalam dengan perbudakan masyarakat kulit hitam. Gerakan ini lahir tanpa perencanaan tetapi murni dari pemikiran kolektif masyarakat kulit hitam yang merasa di marginalisasikan menjadikelompok minoritas. Sebuah gerakan yang bermula dari sebuah surat dari seorang wanita kulit hitam yang merasakan duka berusaha memberi semangat melalui pesan cinta bagai sesama kelompok minoritas. Dibantu oleh dua temannya berhasil menyebarkan pasan ini kepada masyarakat global. Membuat mereka yang senasib berkumpul bukan hanya sebagai korban melainkan sebagai pejuang untuk membantu mengubah status quo menjadi lebih baik.

KAJIAN KONSEPTUAL

Gerakan Sosial Transnasional

Gerakan sosial transnasional adalah kolektivitas kelompok dengan anggota berasal lebih dari satu negara serta beraktifitas tanpa memperdulikan batas negara. Secara kontras gerakan ini memerlukan komunikasi dan kerjasama antara anggota setidaknya dari dua

Negara berbeda (Maiba, 2005). Gerakan sosial transnasional disatukan oleh konstruksi imajinatif sekaligus pemberdayaan dari kolektivitas ide-ide yang menjadi identitas gerakan tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika terjadinya fenomena yang mempengaruhi kehidupan banyak individu. Sebuah fenomena masif yang dapat menimbulkan rasa senasib antara individu tersebut. Para individu ini di satukan oleh rasa senasib baik melalui simpati, empati, maupun sesuatu yang lebih kompleks.

Sebagai sesama aktor non-negara, gerakan sosial transnasional berbeda dengan non-governmental Organization (NGO). Mereka sama-sama terorganisasi tetapi dengan pendekatan berbeda. NGO menggunakan pendekatan formal dan pelebagaan untuk melakukan aktifitas gerakan. Formal disini dimaksud dengan pembentukan proses formal, memiliki bagan organisasi dengan detulisan peran yang jelas, mekanisme rekrutmen dan kriteria keanggotaan yang jelas, status hukum dan manajemen sumber daya, dll. Sedangkan organisasi dalam artian gerakan sosial transnasional mengacu pada aktivitas aktor gerakan untuk secara sengaja mengejar tujuan gerakan tertentu, seperti merencanakan acara protes atau konferensi aktivis. Untuk mewujudkan hal tersebut, para aktivis harus mengerahkan energi untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan material. Namun, ini tidak berarti penciptaan sarana kelembagaan permanen yang melaluinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan (Maiba, 2005).

Gerakan sosial transnasional di era sekarang mayoritas terorganisir secara terbuka, transformatif serta berbentuk jaringan informal atau non-konvensional. Hal ini dikarenakan gerakan ini menghindari sistem hirarki

dalam organisasinya. Adapun motivasi dari hal tersebut yaitu pertama, keragaman kelompok-kelompok yang tergabung didalam gerakan sosial transnasional tidak harus atau dituntut untuk beradaptasi pada host sekaligus mengikuti peraturan mengikat dikarenakan bentuk organisasi informal. Mengingat bahwa kelompok yang tergabung memiliki latar belakang ideologis, model organisasi, budaya aktivis, serta orientasi isu. Berbeda dengan organisasi yang digerakan secara formal, kaku dan tertutup (Maiba, 2005)

Selain itu terciptanya kondisi kondusif didalam jaringan yang tumpang tindih peranan individu atau kelompok berbeda. Tumpang tindih peranan ini menghasilkan jaringan yang mengikat kelompok-kelompok berbeda dalam satu gerakan massif. Kompleksitas dari bentuk informal ini menghasilkan inter-koneksi antara kelompok-kelompok aktivis dari beragam isu dan geografis membangun organ konektivitas (Gamson & Tarrow, 1999) di mana sumber daya, informasi dan repertoar menyebar secara transnasional.

Alasan kedua adalah bentuk transformatif dan fleksibel jaringan membuat gerakan sosial transnasional lebih adaptif serta responsif dalam menangani situasi yang terjadi. Kelincahan dan fleksibilitas dari gerakan yang terorganisir ini akan membuat mereka dapat menyesuaikan dengan periode sejarah yang ditandai dengan perubahan cepat dalam mendefinisikan masalah. Dibantu oleh teknologi komunikasi dan informasi, gerakan sosial transnasional dapat bergerak cepat ketika ada sebuah kesempatan politis baru (Polletta et al., 1999). Dapat dipahami bahwa gerakan sosial transnasional dapat menajag konektivitas antara anggota dengan

teknologi komunikasi-informasi dalam melaksanakan aktivitasnya tanpa terhalangi oleh batas Negara.

Seiring dengan globalisasi, peran dari institusi supranasional semakin menguat secara pengaruh politis dikarenakan oleh kemampuan Negara yang melemah dalam menahan kekuatan global. Ini dibuktikan dengan berpindahnya fungsi regulasi ke tangan institusi supranasional. ini menghasilkan kesempatan baru bagi gerakan sosial transnasional untuk beraliansi serta menargetkan institusi supranasional tersebut. Hal ini dapat membantu gerakan sosial transnasional menekan para pembuat kebijakan di Negara target aktivitas dengan bantuan dari pengaruh institusi supranasional. (Maiba, 2005) Dengan dibantu oleh insitusi supransional, gerakan sosial transnasional bukan hanya mendapat dukungan lokal saya tetapi juga dukungan internasional untuk mencapai tujuan dari gerakan tersebut.

Dengan terbentuknya gerakan sosial dalam skala transnasional membantu menghimpun ide-ide, taktik, kerangka dan sumber daya. Selain memanfaatkan konvergensi protes sebagai ajang pertemuan. Mereka para aktivis juga menggunakan internet agar dapat menukar informasi serta pendekatan strategis guna meraih tujuan. Baik itu halaman web, live streaming, surel dan lain-lainya dengan tujuan meraih informasi mengenai perjuangan dari gerakan serta strategi yang dapat digunakan (Maiba, 2005). Perjuangan tersebut dapat dilakukan melalui cara legal maupun ilegal seperti kampanye online, demonstrasi, lobi maupun negoisasi dengan para pembuat kebijakan di Negara target maupun dengan institusi supranasional.

Dengan menggunakan konsep gerakan sosial transnasional, akan membantu menganalisis gerakan Black

Lives matter dalam aktivitasnya mempromosikan isu kesetaraan rasial masyarakat minoritas yaitu masyarakat kulit hitam di Inggris Raya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini akan menggunakan metode kualitatif bermodel deskriptif-analisis. Pendekatan ini mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dalam penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sekaligus menjelaskan fenomena sosial yang telah maupun sedang terjadi. Proses dari metode ini memerlukan upaya-upaya krusial seperti mengajukan pertanyaan atau prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis sekaligus menafsirkan makna dari data yang diperoleh nantinya (Creswell, 2014). Dengan menggunakan metode ini, penulis akan mencoba menjelaskan Bagaimana peran Gerakan Black Lives Matter sebagai sebuah gerakan sosial berskala transnasional terhadap keamanan kelompok minoritas di Inggris Raya antara tahun 2020-2021.

Data primer akan didapatkan oleh penulis melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara mencari dan memahami informasi berupa data atau dokumen mengenai studi kasus yang dibawa yaitu tentang Gerakan BLM. Informasi tersebut dapat bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, situs internet dan sumber lainnya. Penggunaan studi kepustakaan akan membantu memberi kejelasan antara masalah, teori dan penelitian-penelitian relevan lainnya. Penulis dapat menelaah penelitian-penelitian sebelumnya dengan kasus yang sama diteliti oleh penulis. Menggunakan data dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi akan dapat membantu memecahkan masalah berdasarkan teori-teori

sekaligus rumus-rumus yang telah diuji kebenarannya sekaligus diakui secara umum.

Adapun cara untuk menguji kredibilitas data tulisan ini ditempuh melalui kecukupan referensi. Kecukupan referensi merupakan proses untuk membuktikan keabsahan pada kredibilitas sebuah data dengan menggunakan sumber-sumber atau referensi pendukung untuk membuktikan data yang telah didapat penulis dari data penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bulan sejak kematian George Floyd di tangan polisi, dunia telah menyaksikan beberapa protes anti-rasisme dan ajakan bertindak yang paling terlibat, bersemangat dan teguh dalam ingatan baru-baru ini. Dari Minnesota dan New York hingga Amsterdam dan London, ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan dan media sosial untuk menunjukkan solidaritas dengan gerakan Black Lives Matter dan menuntut pemerintah secara aktif mengakhiri kebrutalan polisi dan rasisme institusional. Ada juga perubahan yang kurang terlihat di seluruh dunia yang lebih sulit diukur. Sejak kematian Floyd, orang-orang telah mengambil kesempatan untuk merenungkan hak istimewa dan ketidaktahuan rasial mereka sendiri. Yang lain telah melakukan percakapan yang tidak nyaman tetapi penting tentang aliansi performatif dan ketidaksetaraan sosial untuk mengetahui bagaimana membuat perubahan yang langgeng dan membuat diri mereka bertanggung jawab atas bias rasial.

Dalam perjuangan yang serupa dengan protes Tembok Berlin pada tahun 1989, pidato Martin Luther King 'I Have a Dream' pada tahun 1963 dan Women's March pada tahun 2017, protes Black Lives Matter pada tahun

2020 adalah bersejarah dan semoga akan terus menginspirasi perubahan. Pada pemakaman Floyd pada 9 Juni, saudaranya Rodney mengatakan kepada pelayat: 'Semua orang akan mengingatnya di seluruh dunia. Dia akan mengubah dunia.' Tidak diragukan lagi, kematian pria berusia 47 tahun itu telah menandai awal dari seruan global untuk bertindak. Menjadi sebuah momentum bagi gerakan Black Lives Matter untuk mengungkap isu ketidaksetaraan rasial guna menarasikan terciptanya kesetaraan rasial di seluruh belahan dunia khususnya di Negara dengan sejarah perbudakan seperti Amerika Serikat, Kanada dan Inggris Raya.

Inggris Raya merupakan salah satu Negara dengan jumlah aktivis dan simpatisan dari gerakan Black Lives Matter terbesar di dunia. Terbukti dari adanya ribuan pengunjung rasa berdemonstrasi di kota-kota termasuk Glasgow, Manchester, Liverpool, Newcastle dan London setelah kematian Floyd. Anggota parlemen dan anti-rasis juga mendesak pemerintah untuk menanggihkan penjualan gas air mata Inggris, pelet karet dan perisai anti huru hara ke AS dan para menteri untuk mengklarifikasi apakah peralatan buatan Inggris saat ini digunakan di AS selama protes. Pada hari Selasa, 9 Juni, Wali Kota London Sadiq Khan meluncurkan 'komisi keragaman' untuk menyelidiki patung mana yang harus dipertahankan, patung mana yang memiliki ikatan perbudakan yang harus dicabut dan status baru yang akan didirikan.

Selain itu, Little Britain telah dihapus dari BBC iPlayer, Netflix dan BritBox di tengah kritik yang muncul kembali dari pemirsa atas penggambaran karakter tertentu (O'MALLEY, 2020). Di Bristol: Sebuah patung pedagang budak Edward Colston dirobokkan selama protes anti-

rasisme dan dibuang ke pelabuhan pada 7 Juni. Seniman yang dikenal sebagai Banksy telah berbagi proposal untuk apa yang harus menggantikan patung itu. London: Pada hari Selasa, 8 Juni patung pedagang budak Robert Milligan ditutup dan kemudian dipindahkan dari luar Museum London Docklands. Glasgow: Patung Sir Robert Peel dirusak oleh pengunjung rasa dan juru kampanye menyerukan semua kota di Inggris untuk menghapus semua tokoh sejarah yang terkait dengan perbudakan dan rasisme. Denbigh: Anggota dewan telah memilih untuk berkonsultasi dengan publik tentang penghapusan patung menghormati petualang Victoria, Henry Morton Stanley yang lawan klaim memiliki hubungan dengan perbudakan.

Sebuah patung pedagang budak yang dipindahkan oleh pengunjung rasa anti-rasisme di kota Bristol, Inggris barat daya bulan lalu telah diganti secara rahasia dengan patung seorang wanita kulit hitam yang membantu merobohkannya. Patung baru, yang menunjukkan pengunjung rasa Black Lives Matter (BLM) Jen Reid dengan tinjunya terangkat, menempati alas tempat patung Edward Colston berdiri di depan orang banyak yang melemparkannya ke pelabuhan Bristol. Berjudul A Surge of Power, patung karya seniman Marc Quinn ditempatkan pada Rabu pagi tanpa sepengetahuan Dewan Kota Bristol.

Walaupun pada akhirnya patung BLM tersebut pada akhirnya diturunkan juga oleh dewan daerah. Patung tersebut akhirnya di tempatkan di museum untuk menarik perhatian dan donasi yang disalurkan untuk gerakan ini kembali. Keberadaan patung ini di sana menimbulkan motivasi bagi masyarakat kulit hitam bahwa operasi dapat dijatuhkan serta tergantikan oleh kebangkitan untuk kesetaraan rasial. hal

ini tetap membawa dampak baik keseluruhan bagain di Inggris Raya untuk lebih mengkaji sekaligus membahas sisa-sisa “objek” perbudakan dalam sejarah. Patung memiliki nilai simbolik dan filosofis, membuat pemasangan atau perletakkannya memberi efek baik itu sebagai motivasi, inspirasi, pemujaan, maupun peringatan. Artinya keberadaan patung mempunyai signifikansi dimana patung tersebut terletak. Penggunaan patung dengan historis perbudakan memberi kesan bahwa opresiadalah bagain kehidupan sehar-hari.

Pertemuan dukungan luas untuk Black Lives Matter dan perbedaan etnis yang jelas dalam kematian terkait Covid-19 dalam pandemi mendorong Boris Johnson sebagai Perdana Menteri untuk mengumumkan pembentukan Komisi tentang perbedaan ras dan etnis pada Juni 2020. Gunakan hanya dengan mengatakan bahwa kita telah membuat kemajuan besar dalam mengatasi rasisme. Masih banyak yang perlu kita lakukan. Kita harus melihat diskriminasi tetapi apa yang sedikit hilang dalam hal ini adalah kisah sukses. Apa yang ingin saya lakukan sebagai perdana menteri adalah mengubah narasi sehingga kami menghentikan rasa menjadi korban dan diskriminasi dan kami mulai memiliki harapan nyata untuk sukses. Sebulan kemudian, keanggotaan diumumkan, dengan Tony Sewell sebagai Ketua dan semua komisaris melarang satu dari latar belakang Asia, Afrika atau Karibia. Komisi diperintahkan untuk menginformasikan percakapan nasional tentang ras yang dipimpin oleh bukti dan membangun audit perbedaan Ras yang diluncurkan pada 2016. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan yang terus berlanjut di empat bidang prioritas, terutama pendidikan,

pekerjaan, peradilan pidana dan kesehatan; untuk memberikan penjelasan atas disparitas yang terus-menerus seperti itu; dan membuat rekomendasi yang tepat untuk mengatasinya. Komisi diminta untuk membuat laporannya pada akhir tahun.

Dari 'BLM marches' menurut laporan itu mencari perubahan di Inggris dan juga AS, tetapi narasi banyak anak muda, berfokus pada keyakinan bahwa 'tidak ada yang berubah menjadi lebih baik' sebagai akibat dari 'rasisme institusional dan hak istimewa kulit putih', mengasingkan 'pusat yang layak, Tantangan besar di zaman kita bukanlah prasangka rasial yang terbuka meaikan tertutup. Ini membangun dan memajukan kemajuan yang dimenangkan oleh perjuangan selama 50 tahun terakhir. Contoh yang lebih baru di mana komunitas minoritas merasa benar-benar dikecewakan' seperti 'tragedi Grenfel atau skandal Windrush' atau 'dampak yang tidak proporsional dari COVID- 19' tidak 'terjadi karena desain dan tentu tidak sengaja dibidik. Kami sebagai masyarakat lebih terbuka dari 50 tahun yang lalu, seperti yang ditunjukkan oleh bukti studi mobilitas sosial. Studi ini menunjukkan bahwa 'anak-anak etnis minoritas dengan orang tua dalam pekerjaan manual rutin jauh lebih mungkin untuk mencapai mobilitas ke atas dibandingkan dengan rekan-rekan kulit putih mereka' dan bahwa terlepas dari variasi, 'ada lebih banyak tanda kemajuan sosial daripada kemunduran dengan beberapa kelompok, seperti yang berasal dari kelompok etnis India dan Cina bahkan lebih baik daripada kelompok etnis Putih dan kelompok lain mengejar'. Oleh karena itu kita perlu melihat melampaui ras, terutama mengingat bahwa dalam pendidikan, 'anak-anak kelas pekerja kulit putih tertinggal di belakang rekan-rekan

mereka di hampir semua kelompok etnis minoritas'.

Inggris menderita 'ketidaksetaraan geografis yang akut' yang 'dalam istilah numerik sederhana' (tetapi tidak dalam istilah proporsional) adalah 'masalah besar Inggris Putih'. Hal ini memperkuat pandangan komisi bahwa 'rekomendasinya harus fokus pada peningkatan hasil untuk semua tidak berpusat pada kelompok etnis tertentu saja'. Meskipun demikian, 'ketidakuntungan rasial sering tumpang tindih dengan ketidakberuntungan kelas sosial', dengan 'orang-orang dari komunitas minoritas lebih cenderung tinggal di rumah tangga dengan pendapatan rendah yang terus-menerus'. Beberapa kelompok telah 'melampaui kerugian itu lebih cepat daripada yang lain', dengan kelompok etnis India dan Cina secara signifikan lebih berhasil daripada kelompok etnis Karibia Hitam dan Pakistan/Bangladesh. Komisi mengidentifikasi dua faktor yang menghalangi keberhasilan: perpecahan keluarga dan integrasi budaya yang terbatas. Perpecahan keluarga lebih tinggi diantara orang Karibia Hitam dan kurangnya integrasi budaya terlihat diantara orang Pakistan/Bangladesh yang cenderung mematuhi norma-norma sosial yang berbeda, terutama dalam kaitannya dengan gender, dengan aktivitas ekonomi yang rendah dan kurangnya kemampuan berbahasa Inggris dikalangan wanita. Komisi bersikeras bahwa ini bukan tentang menyalahkan.

Laporan tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan dan memberikan kontribusi berbasis bukti pada percakapan nasional tentang ras yang terinspirasi oleh gerakan Black Lives Matter. Dan memang ada banyak manfaat dalam laporan yang sesuai dengan literatur akademik dibidang ini: Inggris dicirikan oleh 'ketidakuntungan

rasial dan keragaman etnis' kelompok etnis minoritas terus menghadapi beberapa kerugian umum dibandingkan dengan kelompok etnis mayoritas, sebagian karena diskriminasi rasial (ketidakuntungan ras) tetapi pada saat yang sama ada keragaman yang cukup besar dalam posisi sosial ekonomi kelompok etnis minoritas yang berbeda (keragaman etnis). Rasisme tetap ada dan berdampak signifikan pada individu dan keluarga di komunitas minoritas. Kita tidak dapat berasumsi bahwa ketidakberuntungan rasial/perbedaan etnis berasal dari rasisme atau diskriminasi rasial, tetapi perlu untuk memeriksa bukti secara hati-hati dan menggunakan konsep-konsep kunci secara analitis. Ada banyak bukti bahwa kelompok etnis minoritas telah membuat langkah besar dalam pendidikan dan sampai batas tertentu dalam pekerjaan. Kita perlu mengenali agensi kelompok etnis minoritas yang terus berinvestasi dalam pendidikan dan memanfaatkan modal budaya komunitas mereka sendiri untuk melawan praktik diskriminatif dan dengan demikian memperbaiki situasi mereka. Inggris Raya tidak segan-segan untuk mengumpulkan data tentang identitas etnis masyarakat dan telah berada di garis depan di Eropa dalam mengembangkan undang-undang anti-diskriminasi/kesetaraan dibandingkan dengan banyak negara lain. Langkah-langkah lebih lanjut perlu diambil agar Inggris menjadi masyarakat multikultural yang dinamis yang mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan untuk memperlakukan orang secara setara, untuk menghormati identitas etnis yang berbeda dan mempertahankan nilai-nilai bersama dan kohesi sosial.

Black Lives Matters (BLM) telah mengembalikan rasisme struktural ke dalam agenda, tetapi optimisme awal

yang dirasakan oleh banyak anti-rasis bahwa pada akhirnya tindakan akan diambil untuk mempromosikan kesetaraan rasial agak pupus oleh reaksi balik terhadap agenda ini. Reaksi balik ini perlu dilihat dalam konteks wacana kebenaran anti-politik yang sangat meresap. Wacana ini terdiri dari kerangka penafsiran utama di media yang direproduksi secara tidak kritis oleh banyak jurnalis. Politisi populis terlalu senang untuk menyebarkan wacana ini dan memang tidak menolak untuk mengobarkan perang budaya dan mengejar agenda *anti-Woke* yang mereka yakini bermain baik dengan konstituen mereka. Laporan Sewell ditugaskan oleh pemerintah di Inggris karena diperlukan, mengingat popularitas gerakan BLM, agar terlihat merespons. Pemerintah berhati-hati dalam memilih Ketua dan Komisaris dan karena itu kita tidak boleh terlalu terkejut bahwa laporan akhir mengacu pada banyak kiasan sayap kanan dan sesuai dengan posisi sebelumnya yang diambil oleh Boris Johnson, Munira Mirza dan Tony Sewell: menantang relevansi konsep-konsep kunci seperti rasisme institusional, hak istimewa kulit putih dan dekolonisasi; mempertanyakan definisi subjektif dari insiden rasis; menekankan apa yang dapat dilakukan orang untuk diri mereka sendiri; mengkritik spesialis keragaman, pelatihan bias yang tidak disadari dan kuota; meremehkan rasisme dan mempermainkan geografi dan kelas pekerja kulit putih; menghadirkan karikatur antirasisme seperti merobohkan patung, mengeluarkan penulis kulit putih, dll.; mengabaikan apa yang dicirikan sebagai politik berbasis identitas; dan memuji Inggris sebagai mercusuar bagi dunia.

Pandemi Covid-19 juga memiliki hubungan menarik dengan munculnya kembali gerakan *#blacklivesmatter*.

Langkah-langkah yang diambil untuk memerangi Pandemi Covid-19 di Inggris Raya, seperti perintah tinggal di rumah, gangguan dalam bisnis yang tidak penting dan isolasi sosial, telah meningkatkan pengangguran ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara itu dan banyak orang telah jatuh ke dalam kesulitan keuangan. Dengan sifat polifoniknya, yang mendapat dukungan dari berbagai gerakan sosial, ia telah memperluas cakupannya dengan menciptakan sub-slogan sendiri dan bergema di berbagai geografi. Solidaritas interseksionalitas yang diterima gerakan, serta karakter interseksionalitas tuntutan (Bowleg, 2012). Suara-suara meningkat dengan slogan *#decoloniseUK* dan *#decoloniseacademia* di Inggris melawan eksploitasi dan diskriminasi dan simbol-simbol yang mewakili mereka tampaknya berubah menjadi tuntutan perubahan. Sebagai tanggapan, universitas telah menyatakan bahwa mereka akan membuat kurikulum mereka lebih beragam, inklusif dan internasional.

Rasisme institusional dalam konteks organisasi kerja sektor publik seperti kepolisian, layanan kesehatan nasional dan lainnya di Inggris bukanlah perdebatan baru. Itu diciptakan oleh Laporan Penyelidikan Stephen Lawrence yang mengungkapkan rasisme di kepolisian dan organisasi sektor publik lainnya dan yang menyebabkan reformasi dan tugas publik bagi lembaga-lembaga ini untuk mereformasi struktur rasial mereka (Kamasak et al., 2020). Aspek terpenting dari perubahan ini adalah pengakuan bahwa rasisme bukanlah masalah antarpribadi saja, tetapi bersifat kelembagaan dan bahwa lembaga dengan prosedur, kebijakan dan praktiknya dapat menghasilkan hasil yang rasis. Pengakuan ini telah

menanamkan pemahaman bahwa pelatihan saja tidak akan mengatasi rasisme di Inggris. Harus ada perubahan organisasi dan kegiatan pengembangan untuk menantang praktik kelembagaan rasis.

Black Lives Matter telah menerima dukungan terbesar kedua di Inggris, menunjukkan betapa mengakar, relevan dan diamnya masalah kesetaraan ras masih ada di negara ini. Ada upaya multifaset dan multilevel untuk mempertimbangkan kesetaraan ras sekali lagi karena krisis Covid-19 juga telah menyoroti dampak yang berbeda pada komunitas kulit hitam dan minoritas di negara tersebut, pola yang serupa dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Karena agenda ras diabaikan oleh pemerintah berturut-turut, gerakan tersebut telah diterima dengan baik di Inggris, karena menyentuh luka terbuka dalam hubungan ras di negara itu dan di organisasi yang menderita rasisme institusional.

SIMPULAN

Gerakan transnasional Black Lives Matter hadir di Inggris Raya sebagai sarana untuk menaikan kasus-kasus rasisme institusional diatas agar mendapat perhatian publik guna berujung pemberian tekanan pada pembuat keputusan. Seperti pada kasus undang-undang corona dimana tekanan dari gerakan transnasional tersebut mampu membuat para pembuat kebijakan memikirkan ulang undang-undang tersebut. Gerakan transnasional BLM berfungsi untuk komunitas-komunitas masyarakat kulit hitam dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) suatu daerah dapat menyuarakan narasinya di level internasional.

Hadirnya gerakan BLM membantu masyarakat kulit hitam khususnya di Inggris Raya untuk bersatu dibawah satu bendera dibandingkan dengan

perlawanan dari komunitas-komunitas kecil terpisah. Hal ini membatu agar narasi-narasi kecil dapat perhatian besar bahkan dilevel internasional, baik itu kekerasan polisi hingga permasalahan seperti patung rasis. Pencopotan patung penjual budak serta ikon diskriminasi sebagai bentuk tanda keberhasilan BLM dalam beraksi dan memberi tekanan ke pemerintah. Walaupun terlihat tidak terlalu signifikan tetapi tindakan tersebut mampu memberi harapan perjuangan baru bagi mereka yang tertindas khususnya masyarakat kulit hitam di Inggris Raya

DAFTAR PUSTAKA

- Bowleg, L. (2012). The problem with the phrase women and minorities: Intersectionality-an important theoretical framework for public health. *American Journal of Public Health, 102*(7). <https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.300750>
- Colegrave, S. (2020). *12 FACTS THAT PROVE*. Byline Times. <https://bylinetimes.com/2020/06/08/black-lives-dont-matter-in-britain/>
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Downing, J., & Husband, C. (2005). Representing 'Race' : Racisms, Ethnicity and the Media. In *Sage*. <http://site.ebrary.com/lib/leicester/detail.action?docID=10218028>
- Elena Fella; Maria Dayband. (2017). Against Discrimination: Equality Act 2010 (UK). *The European Proceedings of Sosial & Behavioral Sciences*, 188–194. <https://doi.org/10.15405/epsbs.201>

7.01.25

- Gamson, W. A., & Tarrow, S. (1999). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. *Contemporary Sociology*, 28(3).
<https://doi.org/10.2307/2654187>
- Gidda, M. (2020). *REVEALED: SURGE IN POLICE USE OF FORCE DURING HEIGHT OF LOCKDOWN*. Liberty Investigate.
<https://libertyinvestigates.org.uk/articles/revealed-surge-in-police-use-of-force-during-height-of-lockdown/>
- Gov.Uk. (2021). *Confidence in the local polic*. Gov.Uk.
<https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/crime-justice-and-the-law/policing/confidence-in-the-local-police/latest>
- Harris, S., Joseph-Salisbury, R., Williams, P., & White, L. (2021). A threat to public safety: policing, racism and the Covid-19 pandemic. *The Institute of Race Relations*.
- Kamasak, R., Ozbilgin, M., Baykut, S., & Yavuz, M. (2020). Moving from intersectional hostility to intersectional solidarity: Insights from LGBTQ individuals in Turkey. *Journal of Organizational Change Management*, 33(3).
<https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2018-0328>
- Lustig, M. W., & Koester, J. (2003). *Intercultural Competence: Interpersonal Communication accros Cultures*. Allyn And Becon.
- Maiba, H. (2005). Grassroots transnational social movement activism: The case of peoples' global action. *Sociological Focus*, 38(1).
<https://doi.org/10.1080/00380237.2005.10571256>
- Miriam Budiardjo. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nafilyan, V., & Chris White. (2020). *Coronavirus (COVID-19) related deaths by ethnic group, England and Wales*. Office of National Statistics.
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020>
- Third edition. In *Racial Formation in the United States: Third Edition*.
<https://doi.org/10.4324/9780203076804>
- Polletta, F., Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. *Contemporary Sociology*, 28(1).
<https://doi.org/10.2307/2653901>
- Samovar, L. A., Porter, R. E., & McDaniel, E. R. (2010). Venturing into a New Culture: Becoming Competent. Culture Shock. In *Communication Between Cultures*.